

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
(KPPU RI) SURABAYA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 20/KPPU-I/2009)**

SKRIPSI

**(Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur)**



Oleh :

BAGUS YANIS ARDI PRASETYA
NPM. 0671010006

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2011

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KOMISI PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) SURABAYA (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR. 20/KPPU-I/2009)**

Disusun Oleh :

BAGUS YANIS ARDI PRASETYA
NPM. 0671010006

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NPT. 37507070225

Mengetahui,

D E K A N

Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KOMISI PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) SURABAYA (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR. 20/KPPU-I/2009)

Oleh :

BAGUS YANIS ARDI PRASETYA
NPM. 0671010006

Telah dipertahankan Dihadapan dan Diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 10 Juni 2011

Tim Penguji:

1. Sutrisno, S.H., M.Hum. (.....)
NIP. 19601212 198803 1 001
2. Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M (.....)
NIP. 19620625 199103 1 001
3. Subani, SH., M.Si. (.....)
NIP. 19510504 198303 1 001

Mengetahui,
D E K A N

Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KOMISI PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) SURABAYA (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR. 20/KPPU-I/2009)**

Oleh :

BAGUS YANIS ARDI PRASETYA
NPM. 0671010006

Telah dipertahankan Dihadapan dan Diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 10 Juni 2011

Tim Penguji:

1. Sutrisno, S.H., M.Hum. (.....)
NIP. 19601212 198803 1 001
2. Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M (.....)
NIP. 19620625 199103 1 001
3. Subani, SH., M.Si. (.....)
NIP. 19510504 198303 1 001

Mengetahui,
D E K A N

Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M
NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Bagus Yanis Ardi Prasetya
Tempat/Tanggal Lahir	: Surabaya, 25 Januari 1988
NPM	: 0671010006
Konsentrasi	: Perdata
Alamat	: Perum. TNI AL Block B3 No. 26 Candi – Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KOMISI PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) SURABAYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 20/KPPU-I/2009)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sajar Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
KaProdi

Surabaya, 16 Juni 2011
Penulis,

Subani, SH., M.Si
NIP. 19510504 198303 1 001

Bagus Yanis Ardi Prasetya
NPM. 0671010006

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini peneliti mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KOMISI PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) SURABAYA (Studi Kasus Putusan Nomor. 20/KPPU-I/2009)

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi sebagian prasyarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Peneliti skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta Selaku Dosen Wali Penulis Selama Kuliah.
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta Selaku Dosen Pembimbing Utama.
3. Bapak Subani, S.H. M.Si selaku Ketua Progdi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.kn selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dan dengan kesabarannya membimbing penulis sampai selesainya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak, Letkol Laut Suryono dan Ibu, Emmy Utamy tersayang yang telah memberikan do’a, dorongan, dukungan, moril dan materiil, serta telah mendidik dan membahagiakan saya, Terima kasih atas do’a dan dukungannya, serta tawa canda yang menjadi semangat saya dalam belajar.
7. Kepada Dinas Hukum LANTAMAL V, Letkol Laut Hendro Laksono, S.H selaku Kepala Dinas Hukum LANTAMAL V Dan Mayor Laut Totok Sumarsono, S.H., M.H yang telah membimbing dan memotivasi saya.
8. Semua temanku khususnya Deni Agung Prakoso, Farid Kurniawan, Moch Gufron, Titis Krisna Ayomi, yang telah sedikit banyak meluangkan waktu dan canda tawa serta suportnya.

Penulis menyadari bahwa hasil skripsi yang tersusun ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan hasil skripsi.

Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan sumbangan kecil yang berguna bagi masyarakat, almamater dan ilmu pengetahuan. Tak lupa juga penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas kesalahan yang diperbuat selama penyusunan skripsi.

Surabaya, Juni 2011

Penulis,



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
a. Manfaat Teoritis	5
b. Manfaat Praktis	5
1.5. Kajian Pustaka	6
1.6. Metodologi Penelitian	22
BAB II : KEKUATAN HUKUM PUTUSAN KPPU	
TERHADAP PERKARA NO. 20/KPPU-I/2009	25
2.1. Pengertian Kekuatan Hukum Dari Putusan	25

BAB III :	BENTUK UPAYA HUKUM DARI PARA PIHAK TERHADAP PUTUSAN KPPU RI JAWA TIMUR NO. 20/KPPU-I/2009	41
	3.1. Bentuk Upaya Hukum	41
	3.2. Upaya Hukum yang Ditempuh oleh PT Angkasa Pura (Persero)	52
BAB IV	PENUTUP	58
	4.1. Kesimpulan	58
	4.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Bagus Yanis Ardi Prasetya
NPM : 0671010006
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 25 Januari 1988
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
(KPPU RI) SURABAYA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 20/KPPU-I/2009)**

ABSTRAKSI

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diduga telah terjadi dalam pengelolaan angkutan Taksi di Bandar Udara Juanda, di mana angkutan taksi adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasional terbatas meliputi daerah kota atau perkotaan. Pelayanan angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri tidak berjadwal; dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau station wagon dan van yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal; tarif angkutan berdasarkan argo meter; dan pelayanan dari pintu ke pintu. Kasus praktik monopoli angkutan taksi tersebut ditangani oleh KPPU Surabaya.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Surabaya No. 20/KPPU-I/2009 mengikat para pihak untuk melaksanakannya selama salah satu pihak tidak keberatan atas putusan KPPU tersebut. Putusan KPPU merupakan suatu putusan non litigasi, maksudnya putusan bukan dari pengadilan umum, sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekusi, melainkan harus didasarkan atas penetapan Badan Peradilan Umum seperti Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Bentuk upaya hukum dari para pihak yaitu PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Juanda Surabaya terhadap putusan KPPU RI Surabaya No. 20/KPPU-I/2009 yaitu mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan akhirnya PT Angkasa Pura I (Persero) mengajukan upaya kasasi pada Mahkamah Agung.

Kata kunci : Kekuatan hukum putusan KPPU dan Upaya hukum dalam KPPU.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali.

Perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui cara memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Untuk itu setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Persaingan usaha yang sehat merupakan suatu perwujudan dari pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), yang menentukan bahwa : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal ini sesuai dengan yang dikutip dari *Partnership for*

Business Competition sebagai berikut:¹

Membahas mengenai hukum persaingan yang merupakan salah satu bagian dari hukum ekonomi, pasti tidak akan lepas dari pembahasan mengenai pasal 33 UUD 1945, yang berfungsi sebagai panduan normatif dalam menyusun kebijakan perekonomian nasional. Melalui pasal 33 UUD 1945 tersirat bahwa tujuan pembangunan nasional yang hendak dicapai haruslah berdasarkan demokrasi yang bersifat kerakyatan, yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 melindungi kepentingan rakyat melalui pendekatan kesejahteraan dengan membiarkan mekanisme pasar berjalan bebas.

Pemerintah dalam upayanya untuk menyongsong ekonomi era pasar bebas, bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999).

Tujuan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999, adalah untuk mengarahkan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui cara memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Untuk itu setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

¹*Partnership for Business Competition, Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturannya di Indonesia*, 2001, h. 117.

Di dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat larangan-larangan yang dilakukan oleh pengusaha yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat, salah satu larangan tersebut di antaranya larangan untuk mengadakan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud menurut pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

“suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.

Perjanjian yang dimaksud adalah dilarang jika perjanjian yang dibuat tersebut berakibat terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi salah satunya dengan cara persekongkolan, menurut pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menentukan:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Adanya dugaan telah terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pengelolaan angkutan Taksi di Bandar Udara Juanda, di mana angkutan taksi adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasional terbatas meliputi daerah kota atau perkotaan. Pelayanan angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. tidak berjadwal;

- b. dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau station wagon dan van yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal;
- c. tarif angkutan berdasarkan argo meter;
- d. pelayanan dari pintu ke pintu.

Selama jenis taksi dan tarif operasional angkutan berdasarkan argo meter dan jika dikaitkan dengan setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, maka tidak ada alasan antar pelaku usaha pesaing untuk membatasi dan melarang pelaku usaha pesaing memasuki pasar taksi yang sama. Kenyataan yang terjadi pengelola Bandar Udara Juanda dengan taksi Primanya menghalang-halangi pelaku usaha taksi yang lain untuk memasuki Bandara Juanda untuk bersaing secara sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disingkat KPPU) yang memeriksa kasus pengelolaan Taksi di Bandar Udara Juanda dalam putusannya No. 20/KPPU-I/2009, menyatakan Terlapor I PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Juanda Surabaya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dianalisa dalam skripsi ini yaitu :

1. Apakah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Surabaya No. 20/KPPU-I/2009 mengikat para pihak untuk melaksanakannya?
2. Bagaimana bentuk upaya hukum dari para pihak terhadap putusan KPPU RI Surabaya No. 20/KPPU-I/2009 ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Surabaya mengikat para pihak untuk melaksanakannya.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk upaya hukum dari para pihak terhadap putusan KPPU RI Surabaya No. 20/KPPU-I/2009.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam mengelola taksi di Bandar Udara Juanda.

- b. Manfaat Praktis.

Sebagai masukan yang berkaitan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani permasalahan yang terjadi di Bandar Udara

Juanda di mana pengelola menolak pelaku usaha taksi sebagai pesaing memasuki pasar yang sama.

1.5. Kajian Pustaka

Putusan atau vonis merupakan hasil akhir dari pemeriksaan sidang pengadilan. Putusan pengadilan (litigasi) mempunyai kekuatan hukum jika para pihak tidak melakukan upaya biasa yaitu banding pada Pengadilan Tinggi, kasasi pada Mahkamah Agung atau melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung. Putusan tersebut telah mempunyai kepastian hukum jika tidak menempuh upaya hukum dengan dapat dilaksanakan atau dieksekusi dengan adanya irah-irah kalimat pada putusan tersebut yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan putusan lembaga di luar pengadilan atau non litigasi bersifat himbauan kepada para pihak yang bersengketa, karena putusan non litigasi misalnya Putusan KPPU, KADIN, Arbitrase dan sejenis tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan atau dilakukan eksekusi, karena dalam putusan lembaga non litigasi tidak terdapat irah-irah kalimat pada putusan tersebut yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa". Putusan tersebut jika akan dilakukan eksekusi, maka harus meminta penetapan pada Pengadilan Negeri.

Mengenai Jenis-jenis putusan. Pasal 185 ayat 1 HIR (ps. 196 ayat 1 Rbg) membedakan antara putusan akhir dan putusan bukan putusan akhir.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau

perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*) dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*).²

- a. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan *condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat. Pada umumnya putusan *condemnatoir* itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang. Karena dengan putusan *condemnatoir* itu tergugat diwajibkan untuk memenuhi prestasi, maka hak daripada penggugat yang telah ditetapkan itu dapat dilaksanakan dengan paksa (*execution forcee*). Jadi putusan *condemnatoir* kecuali mempunyai kekuatan mengikat juga memberi alas hak eksekutorial kepada penggugat yang berarti memberi hak kepada penggugat untuk menjalankan putusan secara paksa melalui pengadilan.
- b. Putusan *constitutif* adalah putusan yang menjadikan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (ps. 1266, 1267 BW) dan sebagainya. Putusan *constitutif* ini pada

²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, h. 221-222.

umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut di atas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan daripada pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya paksa. Pengampuan dan kepailitan misalnya terjadi pada saat putusan yang dijatuhkan.

- c. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Juga tiap putusan yang bersifat menolak gugatan merupakan putusan *declaratoir*. Di sini dinyatakan sebagai hukum, bahwa keadaan hukum tertentu yang dituntut oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi. Putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan daripada pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja.

Putusan pengadilan yang berarti sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU No. 48 Tahun 2009). Diundangkannya UU No. 48 Tahun 2009 dapat dilihat pada Konsideran Bagian Menimbang sebagai berikut: kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) adalah :

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha menurut pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang dimaksud dapat berupa orang perorangan maupun badan usaha, asalkan berkedudukan di Indonesia, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha tersebut “boleh dibilang cukup luas hingga mencakup segala jenis dan bentuk usaha, dengan tidak memperhatikan sifat badan hukumnya, sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatannya dalam bidang ekonomi di wilayah Negera Republik Indonesia”.³

b. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Persaingan usaha tidak sehat menurut pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Memperhatikan uraian pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi suatu praktek monopoli apabila terdapat dua atau lebih perusahaan yang memproduksi barang sejenis, memasarkan produknya tersebut secara tidak jujur atau melawan hukum.

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 11.

Di dalam ilmu ekonomi pasar, yang paling ideal adalah pasar yang bersaing sempurna. Persaingan secara sempurna dapat mendorong perusahaan-perusahaan untuk bersaing secara sehat, karena perusahaan-perusahaan tersebut akan menghasilkan produk-produk dengan harga yang lebih murah, dengan mutu yang lebih baik, dan pelayanan yang lebih memuaskan, karena:⁴

- 1) Barang yang diperjualbelikan homogen
Barang tersebut harus memiliki karakteristik yang identik. Jika yang diperjualbelikan adalah mangga, maka kita membahas jenis mangga yang sama dengan kualitas yang sama pula.
- 2) Jumlah penjual dan jumlah pembeli sangat banyak. Mengenai jumlah tidak ada literatur yang menunjukkan berapa nilai sebenarnya sangat banyak itu. Banyak bisa berarti 20, 100 atau bahkan 1000.
- 3) Ciri berikut dari pasar persaingan sempurna adalah tidak adanya hambatan (*barrier to entry*) bagi setiap penjual untuk masuk ke dalam pasar, ataupun untuk keluar dari pasar.
- 4) Pada pasar persaingan sempurna, di mana baik penjual maupun pembeli mengetahui seluruh informasi pasar secara sempurna.

Meskipun UU No. 5 Tahun 1999 telah dengan tegas melarang pelaku usaha menjalankan usahanya menerapkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun kenyataannya usaha dalam menjalankan usahanya:⁵

... akan selalu mencoba memaksimumkan keuntungan yang dapat diraihnyanya. Keuntungan yang paling besar bagi pelaku usaha adalah jika dia dapat menguasai pasar dan menentukan apa yang harus terjadi pada pasar tersebut. Keinginan pelaku usaha untuk menguasai pasar tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu cara yaitu untuk menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar.

Melakukan perbuatan dengan cara menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar dapat dikualifikasikan melakukan persaingan tidak

⁴ *Partnership for Business Competition, Op. cit.*, h. 13.

⁵ *Ibid*, h. 39.

sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat adalah tidak sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam konsideran UU No. 5 Tahun 1999, bagian menimbang menentukan sebagai berikut:

- a. pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- c. setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Ketentuan yang ada dalam konsideran UU No. 5 Tahun 1999, nampak jelas bahwa keinginan dari negara Indonesia adalah melibatkan seluruh warga negara Indonesia dalam proses produksi barang dan jasa, dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatannya dalam proses produksi barang dan harga dapat terwujud jika setiap warga negara dalam menjalankan usahanya dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar. Persaingan yang sehat dan wajar jika dalam menjalankan usahanya dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien.

Persaingan merupakan salah satu bagian hukum ekonomi, yang berarti tidak terlepas dari ketentuan pasal 33 UUD 1945 yang berfungsi sebagai panduan normatif dalam menyusun kebijakan perekonomian

nasional. Melalui pasal 33 UUD 1945 tersirat tujuan pembangunan ekonomi yang hendak dicapai haruslah berdasarkan pada demokrasi yang bersifat kerakyatan, yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa:⁶

Pasal 33 UUD 1945 terkandung makna perlindungan kepentingan rakyat melalui pendekatan kesejahteraan dengan membiarkan mekanisme pasar berlangsung dengan bebas. Selain itu, memberikan petunjuk bahwa jalannya perekonomian nasional tidak begitu saja diserahkan kepada pasar, untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Persaingan usaha yang dilakukan tidak jujur atau disebut juga dengan persaingan usaha yang dilakukan secara negatif, atau sering diistilahkan sebagai persaingan usaha tidak sehat, akan berakibat pada :⁷

- 1) matinya atau berkurangnya persaingan antar pelaku usaha;
- 2) timbulnya praktek monopoli dimana pasar dikuasai hanya oleh pelaku usaha tersebut;
- 3) bahkan kecenderungan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen dengan cara menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selalu mempunyai keinginan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Keuntungan tersebut dapat diperoleh jika pelaku usaha tersebut melakukan perbuatan yang mampu menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. Dengan menghambat pelaku usaha lain masuk ke pasar, maka mempunyai posisi dominan dalam suatu pasar.

⁶ *Ibid.*, h. 76.

⁷ Hikmahanto Juwana, *Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999*, Jurnal Magister 1, September 1999.

Posisi dominan menurut pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Jadi pelaku usaha dapat digolongkan sebagai menguasai pasar atau dominan pada suatu pasar jika pada pasar yang bersangkutan tidak mempunyai pesaing yang berarti pada pasar yang bersangkutan, atau mempunyai posisi tertinggi di antara pesaing baik kemampuan keuangan, akses pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Monopoli menurut pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1999 adalah: “Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”. Monopoli adalah suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu oleh pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sementara itu yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Berbicara mengenai persaingan usaha tidak sehat dan monopoli, menyangkut apa yang disebut kegiatan yang dilarang diatur dalam Bab IV UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 mengupas tentang monopoli yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa;
- 2) penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Berkaitan dengan penguasaan atas produk dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang mengarah pada monopoli di mana monopoli sudah menunjukkan bahwa pelaku usaha berada dalam posisi dominan. Sedangkan posisi dominan ditentukan dalam pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999:

1. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
 - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalang-halangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas, atau
 - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologis, atau mengham-bat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
2. Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
 - a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50 % (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, atau
 - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75 % (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bentuk penguasaan pasar yang disalahgunakan dan dilarang adalah:⁸

- (1) menolak pelaku usaha lain berpartisipasi dalam pasar yang sama atau sengaja menciptakan *barrier to entry* dengan cara *refusal to deal* dan melakukan *primary boycott*.
- (2) menghalangi konsumen/pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan usaha atau melakukan *secondary boycott*.
- (3) melakukan pembatasan produk dan distribusinya dan diskriminasi harga.
- (4) melakukan perbuatan monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.

Dikatakan sebagai telah melakukan penguasaan pasar jika melakukan suatu tindakan yang menguasai sebesar 50 % atau 75 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa sesuai dengan yang dikemukakan oleh Asril Sitompul sebagai berikut:

Ukuran penguasaan pasar tersebut tidak harus 100%, adanya penguasaan sebesar 50% atau 75 % saja sudah dapat dikatakan mempunyai "*market power*", pelaku usaha yang mempunyai *market power* ini harus benar-benar dijadikan perhatian oleh pihak yang berwenang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang anti Monopoli, karena pelaku usaha seperti inilah yang dapat melakukan penguasaan pasar seperti yang diatur dalam pasal-pasal yang disebutkan di atas.⁹

Perihal pengertian penguasaan atas produksi sebagaimana tertuang dalam unsur pasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) barang dari atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
- 2) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;
- 3) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

⁸ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 68.

⁹ Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 30.

Dengan adanya pasal 17 dan pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999, maka pengertian monopoli harus dikaitkan dengan ketentuan pasal 17 dan pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999, dan tidak diartikan penguasaan lebih dari 50 % pangsa pasar atas komoditi tertentu. Oleh banyak kalangan, monopoli dinilai sangat tidak sehat dan mengganggu jalannya mekanisme pasar yang kompetitif. Sebab, monopoli pasar atas komoditi tertentu tersebut dapat membahayakan kepentingan masyarakat luas, terutama konsumen produk yang dimonopoli. Kepentingan konsumen terhadap produk dengan harga yang wajar (*reasonable price*) dan berkualitas baik dapat terancam karena ulah satu atau beberapa pengusaha yang memonopoli pasar produk yang mereka butuhkan.¹⁰

Selain itu, dimonopolinya suatu produk akan menimbulkan derajat inefisiensi ekonomi yang tinggi karena tidak adanya persaingan yang sehat atas produk tersebut. Dalam situasi di mana tidak ada persaingan (kompetisi) atas pengadaan produk tertentu maka perusahaan yang memegang monopoli tidak akan tertarik atau termotivasi untuk menjaga efisiensi dalam produk yang mereka hasilkan. Situasi seperti ini dapat mengakibatkan terjadinya pemborosan sumber daya, terutama sumber daya alam.

Monopolistik di bidang ekonomi menjadi semakin buruk dan sangat membahayakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan bila monopolistik tersebut diciptakan dan didukung oleh pemerintah (penguasa politik). Keadaan seperti ini jelas-jelas dapat mematikan jalannya

¹⁰ *Ibid.*, h. 31

mekanisme pasar yang sehat dan kompetitif. Bila keadaan seperti ini terus dibiarkan maka akan dapat melumpuhkan sistem politik yang demokratis.

Namun, monopoli keadaan dan pemasaran suatu produk sebenarnya dapat terjadi secara natural. Misalnya, sebuah perusahaan yang memproduksi suatu produk tertentu karena kemampuan manajemennya dapat mencapai derajat efisiensi yang relatif tinggi. Perusahaan tersebut dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Dengan demikian, perusahaan tersebut dapat mengalahkan pesaing-pesaingnya dan pada akhirnya mampu memonopoli dan mengontrol pasar. Tingkat monopoli seperti ini amat sulit untuk dicapai.

Oleh karena penguasaan pasar atau monopoli pasar tersebut dinilai tidak sehat maka diupayakan agar keadaan monopoli tidak terjadi. Caranya dengan membuat aturan yang memadai dan tegas, antara lain tampak pada unsur monopoli pasal 25 ayat (1) huruf a, b, c UU No. 5 Tahun 1999.

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah dilarang, karena pada praktek monopoli terjadi:¹¹

- a. pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha;
- b. adanya penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu;
- c. terjadi persaingan usaha tidak sehat;
- d. tindakan tersebut merugikan kepentingan umum.

¹¹ *Ibid.*, h. 25.

Dengan demikian perusahaan dikatakan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, jika dalam menjalankan usaha memenuhi keseluruhan unsur pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini berarti bahwa meskipun usahanya telah menguasai produk atau pemasaran barang tertentu lebih dari 50 %, namun jika tidak merugikan kepentingan umum dan kepentingan usaha pesaing , maka tidak dapat dikatakan telah melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dikatakan telah terjadi pemusatan kekuatan ekonomi apabila terjadi hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (3) UU No. 5 Tahun 1999 yang menentukan:

“Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha, sehingga dapat “menentukan harga barang dan atau jasa”.

Dengan terjadinya pemusatan ekonomi pasar, maka ”harga dari barang atau jasa yang diperdagangkan tidak lagi mengikuti hukum ekonomi mengenai permintaan dan penjualan, melainkan semata-mata ditentukan oleh satu atau lebih pelaku ekonomi yang menguasai pasar tersebut”.¹²

Wujud penguasaan pasar ini dapat pula terjadi dalam bentuk penjualan atau pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara “jual rugi”

¹² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. cit.*, h. 18.

(*predatory pricing*) dengan maksud untuk “mematikan” pesaingnya seperti yang dilarang dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 menentukan:¹³

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Penetapan harga yang dikenal pula dengan *predatory pricing* atau penetapan harga pasar ditinjau dari segi ekonomi adalah:¹⁴

Suatu kebijakan penetapan harga yang dilakukan oleh sebuah atau banyak perusahaan dengan tujuan untuk merugikan para pemasok pesaing atau untuk memeras konsumen. Penekanan harga (*pricing squeezing*) dan pemotongan harga “selektif” untuk menggusur para pesaing ke luar dari pasar, sementara pemerasan terhadap konsumen dilakukan dengan penetapan harga yang tinggi oleh para pemasok monopoli (*monopoly*) dan kartel (*cartels*).

Di samping itu, pada prakteknya para perusahaan konglomerat yang memonopoli pasar biasanya juga menggunakan persaingan harga (*price competition*) untuk mendorong produksi dengan kapasitas penuh atau melakukan diskriminasi harga sebagai alat untuk memperbesar laba. Jika berpedoman pada bunyi Pasal 20, maka *price competition* sebenarnya tidak melanggar undang-undang ini sepanjang tidak ditujukan untuk mematikan atau perbuatan itu tidak menyebabkan matinya pesaingnya di pasar. Dengan demikian, maksud utama (*main purpose*) dari suatu perbuatan pelaku usaha sangat menentukan sekali dalam menilai apakah perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

¹³ Asril Sitompul, *Op. Cit.*, h. 30.

¹⁴ Elyta Ras Ginting, *Op. Cit.*, h. 69.

c. Pengertian Kegiatan Yang Dilarang

Pelaku usaha menjalankan usahanya masuk dalam pasar, adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Sebagai pelaku usaha menjalankan usahanya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di antaranya tidak diperkenankan untuk melanggar larangan-larangan. Larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha di antaranya:¹⁵

- 1) perjanjian yang dilarang, dan
- 2) kegiatan yang dilarang.

Dalam pembahasan berikutnya, materinya dibatasi mengenai kegiatan yang dilarang sesuai dengan materi yang dibahas.

Kegiatan yang dilarang, meliputi:¹⁶

- 1) monopoli;
- 2) monopsoni;
- 3) penguasaan pasar;
- 4) persekongkolan.

¹⁵Elyta Ras Ginting, *Ibid.*, h. 32-57.

¹⁶*Ibid.*, h. 59-71.

d. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut pasal 1 angka 18 UU No. 5 Tahun 1999 adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Mengenai penunjukan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdapat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005, dengan masa jabatan 7 2005 – 2010.

1.6. Metodologi Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum, dengan pendekatan permasalahan secara *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach*, artinya pendekatan terhadap masalah yang diajukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan *Conceptual approach* artinya pendekatan permasalahan berdasarkan konsep-konsep hukum.

b. Sumber Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengidentifikasinya seluruh bahan hukum baik berupa peraturan perundang-undangan maupun pendapat para sarjana, kemudian bahan hukum tersebut diolah dengan cara dipilah-pilah dari bahan hukum yang bersifat umum kemudian disimpulkan menjadi khusus, sehingga diperoleh bahan hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini.

d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap

permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

e. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini diawali Bab pertama, Pendahuluan, berisikan gambaran umum permasalahan, yang merupakan pengantar pembahasan pada bab berikutnya. Sub babnya terdiri atas Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua dengan judul bab Kekuatan Hukum Putusan KPPU Terhadap Perkara No. 20/KPPU-I/2009. Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan pertama apakah putusan KPPU terhadap perkara No. 20/KPPU-I/2009 sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bab ketiga dengan judul bab Bentuk Upaya Hukum Dari Para Pihak Terhadap Putusan KPPU Dalam Perkara No. No. 20/KPPU-I/2009. Bab ini dikupas untuk menjawab permasalahan kedua yaitu bagaimana bentuk upaya hukum dari para pihak terhadap putusan KPPU dalam perkara No. No. 20/KPPU-I/2009.

Bab keempat adalah bagian terakhir dari usulan penelitian skripsi yang berisi Kesimpulan dan Saran.